OPTIMALISASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

Fit Karlos Mote
NPP. 33.1110
Program Studi Keuangan Publik
Email: charlosmote@gmail.com

Pembimbing Skripsi: H. Haromin, S.Sos., M.Si
Email: harominsanusi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the importance of optimizing the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik) in supporting regional infrastructure development, particularly in Nabire Regency, Central Papua Province. The need for infrastructure development, such as roads, bridges, irrigation, sanitation, and public service supporting facilities, remains an important concern because it is directly related to accessibility, regional connectivity, and the quality of public services. In addition, studies on the optimization of DAK Fisik in Central Papua, particularly in Nabire Regency, are still relatively limited, making a more contextual study necessary.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the optimization of the Physical Special Allocation Fund (DAK Fisik) in improving infrastructure development in Nabire Regency, Central Papua Province.* ***Method:*** *This research uses a qualitative method with a descriptive-inductive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of officials from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Nabire Regency and the Public Works and Public Housing Office (PUPR) of Nabire Regency. The analysis used the optimization theory, which includes the dimensions of objectives, alternative decisions, and resources.* ***Result:*** *The results show that the optimization of DAK Fisik in Nabire Regency has been implemented fairly well. In the objective dimension, the use of DAK Fisik has been directed toward priority infrastructure development. In the alternative decision dimension, the local government has determined activity priorities based on regional needs and implementation readiness. In the resource dimension, institutional support through BPKAD and PUPR is already available, although the capacity of apparatus and administrative systems still needs to be strengthened.* ***Conclusion:*** *Therefore, DAK Fisik has played an important role as an instrument in supporting infrastructure development in Nabire Regency, particularly in strengthening accessibility, regional connectivity, and basic public services.*

Keywords: *DAK Fisik, optimization, infrastructure development, Nabire Regency, regional finance*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah, khususnya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana pendukung pelayanan publik masih menjadi perhatian penting karena berkaitan

langsung dengan aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas pelayanan masyarakat. Selain itu, kajian mengenai optimalisasi DAK Fisik pada wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire, masih relatif terbatas sehingga diperlukan penelitian yang lebih kontekstual. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-induktif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nabire. Analisis penelitian menggunakan teori optimalisasi yang meliputi dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi DAK Fisik di Kabupaten Nabire telah berjalan cukup baik. Pada dimensi tujuan, penggunaan DAK Fisik telah diarahkan pada pembangunan infrastruktur prioritas. Pada dimensi alternatif keputusan, pemerintah daerah telah menentukan prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah dan kesiapan pelaksanaan. Pada dimensi sumber daya, dukungan kelembagaan melalui BPKAD dan PUPR telah tersedia, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur dan sistem administrasi. **Kesimpulan:** Dengan demikian, DAK Fisik telah berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire, terutama dalam memperkuat aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan dasar masyarakat.

Kata kunci: DAK Fisik, optimalisasi, pembangunan infrastruktur, Kabupaten Nabire, keuangan daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Infrastruktur yang memadai dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas barang dan jasa, membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan, serta meningkatkan produktivitas ekonomi lokal. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan transfer fiskal dari pemerintah pusat menjadi penting dalam memperkuat kapasitas belanja daerah, terutama untuk membiayai pembangunan fisik yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat (Lewis, 2013; Aritenang, 2020).

Salah satu instrumen transfer fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam praktiknya, DAK Fisik diarahkan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti jalan, jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur dasar lainnya. Keberadaan DAK Fisik menjadi penting karena mampu membantu daerah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur, khususnya pada daerah yang masih memiliki keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan menghadapi ketimpangan pembangunan antarwilayah (Sulaeman & Andriyanto, 2021; Azaki & Lutfi, 2023).

Optimalisasi pengelolaan DAK Fisik tidak hanya berkaitan dengan besarnya alokasi anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut secara tepat

sasaran. Dana yang besar tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak didukung oleh perencanaan yang baik, ketepatan prioritas program, kesiapan pelaksanaan, serta kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan kegiatan yang dibiayai. Dengan demikian, optimalisasi DAK Fisik perlu dilihat sebagai proses pengelolaan yang menekankan keterpaduan antara tujuan pembangunan, pilihan program prioritas, serta ketersediaan sumber daya pendukung. Pengelolaan DAK yang efektif terbukti dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik apabila diarahkan pada kebutuhan riil daerah dan dilaksanakan melalui tata kelola yang terencana (Trisnawati & Yudartha, 2024; Irmanda et al., 2024).

Dalam pembangunan daerah, infrastruktur memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Pembangunan irigasi dapat mendukung produktivitas sektor pertanian, sedangkan pembangunan air minum dan sanitasi berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, DAK Fisik memiliki posisi penting sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja infrastruktur dan dukungan transfer fiskal dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik apabila pengelolaannya dilakukan secara efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan daerah (Lewis, 2017; Fadilla & Ratnawati, 2024; Hardianto et al., 2024).

Konteks pembangunan infrastruktur menjadi semakin penting pada wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks, seperti Papua dan Papua Tengah. Kondisi geografis berupa wilayah yang luas, akses transportasi yang terbatas, sebaran penduduk yang tidak merata, serta biaya pembangunan yang relatif tinggi menyebabkan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang lebih terarah. Infrastruktur di wilayah Papua tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai penghubung sosial dan ekonomi antarwilayah yang dapat mengurangi keterisolasian serta memperkuat pemerataan pembangunan. Dalam kondisi seperti ini, optimalisasi dana transfer yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat (Saktina & Khoirunnurrofik, 2022; Mahi & Resosudarmo, 2024).

Kabupaten Nabire sebagai salah satu daerah di Provinsi Papua Tengah memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar, terutama dalam penyediaan jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, serta sarana dasar pendukung pelayanan publik. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan posisi Kabupaten Nabire sebagai daerah yang membutuhkan konektivitas wilayah untuk mendukung aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Berdasarkan data dalam skripsi, penerimaan DAK Fisik Kabupaten Nabire menunjukkan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 15,84% pada tahun 2023, 14,43% pada tahun 2024, dan 10,17% pada tahun 2025. Penurunan persentase tersebut menunjukkan bahwa penggunaan DAK Fisik perlu diarahkan secara semakin selektif, efektif, dan tepat sasaran agar tetap mampu mendukung pembangunan infrastruktur prioritas daerah di tengah keterbatasan alokasi anggaran. Data ini bersumber dari naskah skripsi yang menunjukkan tabel penerimaan DAK Fisik Kabupaten Nabire tahun 2023–2025.

Selain persoalan alokasi, optimalisasi DAK Fisik di Kabupaten Nabire perlu diperhatikan karena pembangunan infrastruktur daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam naskah skripsi dijelaskan bahwa penggunaan DAK Fisik di Kabupaten Nabire diarahkan pada pembangunan infrastruktur prioritas, terutama jalan dan jembatan, guna meningkatkan akses transportasi dan konektivitas masyarakat antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa DAK Fisik memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Namun, agar manfaat tersebut dapat dicapai secara maksimal, pengelolaan DAK Fisik harus memperhatikan ketepatan tujuan, pemilihan prioritas kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan transfer fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran dana, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam mengelola

anggaran, menyusun prioritas, dan melaksanakan pembangunan secara efektif (Vidyattama et al., 2022; Pambudi, 2023).

Penelitian mengenai DAK Fisik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, air minum, dan sanitasi, atau dilakukan pada wilayah yang memiliki karakteristik berbeda dengan Kabupaten Nabire. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa DAK dapat mendukung pembangunan sarana dan prasarana apabila dikelola secara efektif, tetapi hasilnya sangat bergantung pada kesiapan daerah, kualitas perencanaan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal (Nilawati & Sugiri, 2022; Trisnawati & Yudartha, 2024; Pambudi, 2023). Sementara itu, kajian mengenai optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur pada wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk mengkaji secara lebih spesifik bagaimana DAK Fisik dioptimalkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah dengan karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan yang khas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai optimalisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana DAK Fisik digunakan sebagai instrumen pembangunan daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur prioritas, terutama melalui ketepatan tujuan, alternatif keputusan, dan pemanfaatan sumber daya. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keuangan publik daerah, khususnya mengenai pengelolaan dana transfer fiskal, serta memberikan gambaran empiris mengenai optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan DAK Fisik agar lebih efektif, terarah, dan berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks pembangunan daerah. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, air minum, sanitasi, dan irigasi, sehingga belum banyak yang secara khusus membahas optimalisasi DAK Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar daerah secara menyeluruh. Penelitian (Trisnawati & Yudartha, 2024) membahas pengelolaan DAK dalam optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Badung. Penelitian tersebut memiliki relevansi dalam aspek pengelolaan DAK, tetapi fokus sektornya terbatas pada bidang pendidikan, sedangkan penelitian ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana pendukung pelayanan publik di Kabupaten Nabire. Demikian pula, penelitian (Nilawati & Sugiri, 2022) membahas penggunaan DAK Fisik pada sektor pariwisata melalui perbaikan kawasan wisata Museum Karst Indonesia. Meskipun sama-sama membahas DAK Fisik, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengembangan kawasan wisata, bukan pada optimalisasi DAK Fisik untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah.

Pada penelitian lain, kajian mengenai DAK Fisik juga masih banyak diarahkan pada bidang pelayanan dasar tertentu dan belum sepenuhnya menjelaskan keterkaitannya dengan optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah secara komprehensif. Penelitian (Irmanda et al., 2024) membahas pengelolaan DAK Fisik bidang air minum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik memiliki peran penting dalam pemenuhan layanan infrastruktur air minum, tetapi ruang lingkupnya masih terbatas pada satu bidang pelayanan dasar. Sementara itu, penelitian (Fadilla & Ratnawati, 2024) mengkaji peranan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan melalui DAK Fisik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun pendekatan yang digunakan lebih menekankan hubungan antarvariabel pembangunan dan kualitas hidup masyarakat pada cakupan wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji proses optimalisasi DAK

Fisik pada tingkat kabupaten dengan karakteristik geografis dan kebutuhan infrastruktur yang kompleks seperti Kabupaten Nabire.

Selain perbedaan sektor kajian, kesenjangan masalah juga terlihat dari aspek wilayah penelitian. Beberapa penelitian terdahulu banyak dilakukan pada daerah yang memiliki kondisi geografis, kapasitas fiskal, dan aksesibilitas wilayah yang berbeda dengan Papua Tengah. Penelitian (Aritenang, 2020) menunjukkan bahwa transfer antarpemerintah berpengaruh terhadap belanja infrastruktur daerah di Indonesia, tetapi kajian tersebut lebih bersifat umum dan belum menjelaskan secara spesifik kondisi daerah tertentu yang menghadapi tantangan geografis cukup besar. Penelitian (Saktina & Khoirunnurrofik, 2022) memang telah membahas hubungan kondisi geografis dengan ketersediaan infrastruktur jalan di Papua melalui dana otonomi khusus, namun fokus penelitian tersebut tidak secara langsung membahas optimalisasi DAK Fisik sebagai instrumen transfer fiskal dalam pembangunan infrastruktur kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai optimalisasi DAK Fisik di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire, masih membutuhkan pembahasan yang lebih kontekstual.

Kesenjangan berikutnya terlihat dari pendekatan penelitian yang digunakan. Beberapa penelitian mengenai DAK Fisik dan pembangunan daerah masih menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat pengaruh dana transfer terhadap indikator pembangunan tertentu. Penelitian (Hardianto et al., 2024) menganalisis pengaruh DAK Fisik dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Bolaang Mongondow Raya. Penelitian tersebut penting dalam melihat dampak DAK Fisik terhadap pembangunan manusia, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana proses optimalisasi penggunaan DAK Fisik dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian (Lewis, 2013) dan (Lewis, 2017) juga menunjukkan pentingnya transfer fiskal dan belanja pemerintah daerah terhadap penyediaan infrastruktur serta pelayanan publik, tetapi kajiannya lebih menekankan hubungan fiskal dan capaian layanan secara umum. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian kualitatif yang mampu menggambarkan secara lebih rinci bagaimana DAK Fisik dioptimalkan melalui penentuan tujuan, pemilihan alternatif keputusan, dan pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Kajian dari lingkungan pemerintahan juga menunjukkan bahwa DAK Fisik merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Penelitian (Pambudi, 2021) menekankan bahwa pelaksanaan DAK Fisik memerlukan kesesuaian antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara tepat sasaran. Penelitian (Pambudi & Pramujo, 2022) menunjukkan bahwa dana transfer khusus memiliki peran dalam pembangunan bidang irigasi pascabencana, sehingga DAK Fisik dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan dan pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya, penelitian (Pambudi, 2022) menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan secara top-down dan bottom-up dalam pelaksanaan DAK Fisik. Namun demikian, beberapa penelitian tersebut masih menekankan aspek kebijakan, sinkronisasi perencanaan, atau sektor tertentu, sehingga belum secara khusus mengkaji optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur daerah pada lokus Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas optimalisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai pentingnya DAK Fisik dalam mendukung berbagai sektor pembangunan, tetapi belum banyak yang mengkaji secara khusus bagaimana DAK Fisik diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah dengan menggunakan dimensi optimalisasi yang meliputi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena tidak hanya melihat DAK Fisik sebagai dana transfer, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang perlu dioptimalkan agar mampu mendukung pembangunan infrastruktur secara lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Nabire.

.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur menjadi penting dilakukan karena pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dana tersebut secara tepat sasaran. DAK Fisik memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen transfer fiskal yang diarahkan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik sesuai prioritas nasional dan kebutuhan daerah. Apabila pengelolaan DAK Fisik tidak dikaji secara mendalam, maka terdapat risiko bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tidak memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan DAK Fisik membutuhkan keselarasan perencanaan pusat dan daerah, ketepatan alokasi, serta penguatan pelaksanaan di tingkat daerah agar manfaat pembangunan dapat tercapai secara efektif (Pambudi, 2021; Pambudi & Pramujo, 2022).

Secara keilmuan, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian keuangan publik dan pembangunan daerah, khususnya mengenai optimalisasi penggunaan dana transfer dalam pembangunan infrastruktur pada tingkat kabupaten. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas DAK Fisik pada sektor tertentu, seperti pendidikan, irigasi, air minum, dan pariwisata, namun kajian yang secara khusus membahas optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Papua Tengah masih terbatas. Padahal, karakteristik geografis, kebutuhan konektivitas, serta keterbatasan akses antarwilayah menjadikan pembangunan infrastruktur di Papua memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana DAK Fisik dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan daerah (Saktina & Khoirunnurrofik, 2022; Pambudi et al., 2022).

Dari sisi empiris, urgensi penelitian ini terlihat dari kondisi Kabupaten Nabire yang masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana pendukung pelayanan publik. Berdasarkan data dalam skripsi, penerimaan DAK Fisik Kabupaten Nabire menunjukkan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari 15,84% pada tahun 2023 menjadi 14,43% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 10,17% pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi DAK Fisik perlu dikaji agar keterbatasan alokasi anggaran tetap dapat diarahkan pada kegiatan pembangunan yang paling prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting sebagai dasar untuk melihat sejauh mana DAK Fisik telah digunakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire secara efektif dan terarah.

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan DAK Fisik agar pembangunan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa kajian yang spesifik dan berbasis kondisi lapangan, kebijakan penggunaan DAK Fisik berpotensi hanya dipahami sebagai kegiatan administratif anggaran, bukan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Penelitian terbaru menegaskan bahwa efektivitas dana transfer untuk infrastruktur sangat dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan, kapasitas pengelolaan, serta kemampuan daerah dalam menyesuaikan program dengan prioritas pembangunan lokal (Azaki & Lutfi, 2023; Irmanda et al., 2024; Mahi & Resosudarmo, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memberikan gambaran bagi pemerintah daerah mengenai optimalisasi DAK Fisik sebagai pendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dana transfer khusus, dan pembangunan infrastruktur daerah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, tetapi fokus kajian, sektor pembangunan, lokasi penelitian, serta pendekatan analisis yang digunakan masih beragam. Oleh karena itu, penelitian terdahulu menjadi dasar penting

dalam melihat posisi penelitian ini, khususnya dalam mengkaji optimalisasi DAK Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Penelitian (Pambudi, 2021) mengkaji evaluasi berjalan DAK Fisik bidang pendidikan pada masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan berbasis Intelligence Media Management. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan DAK Fisik membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan agar pemanfaatannya dapat berjalan sesuai tujuan program dan kebutuhan daerah. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pelaksanaan DAK Fisik, tetapi berbeda pada fokus kajiannya. Penelitian (Pambudi, 2021) menitikberatkan pada bidang pendidikan dan proses evaluasi kebijakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Nabire.

Selanjutnya, penelitian (Pambudi & Pramujo, 2022) membahas peran dana transfer khusus dalam pembangunan bidang irigasi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana transfer khusus dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan dan pembangunan infrastruktur, terutama pada daerah yang membutuhkan intervensi anggaran untuk memperbaiki sarana publik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai dana transfer untuk pembangunan fisik, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks dan objek penelitian. Penelitian (Pambudi & Pramujo, 2022) berfokus pada pembangunan irigasi pascabencana, sementara penelitian ini menelaah optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur daerah secara lebih luas, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana pendukung pelayanan publik.

Penelitian (Nilawati & Sugiri, 2022) membahas penggunaan DAK Fisik untuk perbaikan kawasan wisata Museum Karst Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik dapat mendukung pembangunan sarana fisik pada sektor pariwisata, meskipun efektivitas pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh koordinasi dan pengelolaan program. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pemanfaatan DAK Fisik sebagai instrumen pembangunan. Namun, penelitian (Nilawati & Sugiri, 2022) lebih berfokus pada sektor pariwisata, sedangkan penelitian ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar daerah di Kabupaten Nabire. Dengan demikian, penelitian ini memiliki cakupan yang berbeda karena menempatkan DAK Fisik sebagai pendukung pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan konektivitas dan pelayanan publik masyarakat.

Penelitian (Saktina & Khoirunnurrofik, 2022) mengkaji pengaruh kondisi geografis terhadap peran Dana Otonomi Khusus dalam ketersediaan infrastruktur jalan di Papua. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik geografis memiliki pengaruh penting terhadap pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah Papua yang memiliki tantangan aksesibilitas dan biaya pembangunan yang lebih tinggi. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Namun, penelitian (Saktina & Khoirunnurrofik, 2022) lebih menekankan peran Dana Otonomi Khusus terhadap infrastruktur jalan, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas optimalisasi DAK Fisik sebagai instrumen transfer fiskal dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Penelitian (Trisnawati & Yudartha, 2024) menganalisis pengelolaan DAK terhadap optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Badung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan DAK yang baik dapat mendukung pencapaian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih efektif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan konsep optimalisasi dalam pengelolaan DAK. Akan tetapi, penelitian (Trisnawati & Yudartha, 2024) berfokus pada sektor pendidikan, sedangkan

penelitian ini membahas pembangunan infrastruktur dasar daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki ruang kajian yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan fisik Kabupaten Nabire, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang menunjang akses masyarakat.

Penelitian (Irmanda et al., 2024) membahas pengelolaan DAK Air Minum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan DAK Fisik bidang air minum berkontribusi terhadap pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Kajian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan DAK Fisik sebagai bagian dari instrumen pembangunan daerah. Namun, penelitian (Irmanda et al., 2024) hanya menitikberatkan pada bidang air minum, sedangkan penelitian ini membahas optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur secara lebih luas, terutama pada sektor jalan, jembatan, irigasi, dan sarana pendukung pelayanan publik di Kabupaten Nabire.

Penelitian (Najmuddin et al., 2024) meneliti efektivitas penggunaan dana desa terhadap pengembangan infrastruktur desa dan potensi ekonomi lokal di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana pembangunan yang efektif dapat mendukung penyediaan infrastruktur serta meningkatkan potensi ekonomi lokal. Meskipun penelitian tersebut tidak secara khusus membahas DAK Fisik, kajiannya tetap relevan karena menunjukkan pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur. Perbedaannya, penelitian (Najmuddin et al., 2024) berfokus pada dana desa dan infrastruktur desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur daerah pada tingkat kabupaten.

Penelitian (Puspitasari et al., 2025) mengkaji dampak anggaran DAK bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang tahun 2019–2024. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAK dapat berperan dalam mendukung pembangunan sektor pelayanan dasar dan memberikan dampak terhadap pembangunan daerah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai DAK sebagai instrumen fiskal daerah. Namun, penelitian (Puspitasari et al., 2025) menggunakan fokus bidang kesehatan dan mengarah pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada optimalisasi DAK Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa DAK Fisik dan dana transfer khusus memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, air minum, irigasi, maupun infrastruktur. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada sektor tertentu dan wilayah penelitian yang berbeda. Kajian yang secara khusus membahas optimalisasi DAK Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pada tingkat kabupaten di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Nabire, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan analisis yang lebih kontekstual mengenai optimalisasi DAK Fisik berdasarkan dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu, terutama dari sisi objek, fokus kajian, dan dasar analisis yang digunakan. Dari sisi objek, penelitian ini secara spesifik dilakukan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, yaitu daerah yang memiliki karakteristik geografis, kebutuhan konektivitas, dan tantangan pembangunan infrastruktur yang berbeda dengan daerah lain, sehingga memberikan perspektif yang lebih kontekstual terhadap

pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di wilayah Papua Tengah. Dari sisi fokus kajian, penelitian ini tidak hanya membahas DAK Fisik sebagai instrumen transfer fiskal, tetapi menempatkannya sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana pendukung pelayanan publik. Dari sisi analisis, penelitian ini menggunakan teori optimalisasi yang menekankan pada aspek tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya, sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas efektivitas DAK pada sektor tertentu seperti pendidikan, pariwisata, air minum, atau irigasi. Kebaruan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan penentuan prioritas, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya pembangunan secara terarah (Ridwan & Baso, 2017). Selain itu, pengelolaan keuangan publik yang baik juga menuntut adanya akuntabilitas, ketepatan penggunaan anggaran, dan pengawasan agar dana publik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Akbar, 2013). Penelitian ini juga diperkuat oleh temuan bahwa pelaksanaan DAK Fisik perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan tujuan pembangunan nasional (Pambudi, 2021), serta bahwa dana transfer khusus dapat berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur apabila diarahkan secara tepat pada kebutuhan pembangunan daerah (Pambudi & Pramujo, 2022). Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire yang dianalisis secara lebih spesifik, kontekstual, dan berbasis pada dimensi optimalisasi.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-induktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam proses optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Penelitian kualitatif dipandang sesuai karena mampu menggambarkan fenomena pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Dalam penelitian pemerintahan, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami gejala pemerintahan secara kontekstual melalui penggalian data dari informan, dokumen, dan kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian (Simangunsong, 2017). Selain itu, penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, dengan proses analisis yang bersifat induktif dan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2023). Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai tepat untuk menjelaskan bagaimana tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya dalam pengelolaan DAK Fisik diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki kewenangan, pengetahuan, dan keterlibatan dalam pengelolaan DAK Fisik serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan, data anggaran, dokumen perencanaan, dokumentasi kegiatan, serta data pendukung lain yang berkaitan dengan pengelolaan DAK Fisik dan pembangunan infrastruktur daerah. Data sekunder yang bersifat internal diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire,

terutama yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan distribusi belanja daerah, serta data realisasi DAK Fisik. Data pendukung lainnya diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nabire sebagai perangkat daerah teknis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena informan dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, bukan sekadar didasarkan pada jumlah informan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala BPKAD Kabupaten Nabire dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire, karena keduanya memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui DAK Fisik. Selain informan kunci, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung dari unsur BPKAD dan PUPR, yaitu Sekretaris BPKAD, Kasubbag Program dan Pelaporan BPKAD, Kasubbag Keuangan dan Aset BPKAD, Kabid Perbendaharaan BPKAD, Kabid Anggaran BPKAD, Kabid Cipta Karya PUPR, serta Subbagian Perencanaan. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari sisi kebijakan anggaran, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, koordinasi antarperangkat daerah, serta kondisi empiris pembangunan infrastruktur di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari informan terkait proses optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi objek penelitian dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penggunaan DAK Fisik. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data tertulis maupun visual, seperti dokumen anggaran, laporan realisasi, dokumen perencanaan, foto kegiatan, serta data pendukung lainnya. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data tersebut dilakukan agar informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga diperkuat oleh dokumen dan kondisi lapangan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat menggambarkan proses pengelolaan DAK Fisik secara lebih utuh.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, baik dari BPKAD maupun PUPR Kabupaten Nabire. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh. Pengujian keabsahan data ini penting dilakukan agar hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi, tetapi dapat dipertanggungjawabkan melalui pembandingan berbagai data yang relevan. Dengan cara tersebut, temuan penelitian diharapkan mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya mengenai optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul direduksi dengan cara memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar informasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berulang untuk memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan sesuai dengan data lapangan. Analisis data dalam penelitian ini diarahkan pada teori optimalisasi yang meliputi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya, sehingga

pembahasan dapat menjelaskan sejauh mana DAK Fisik di Kabupaten Nabire telah dioptimalkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dengan lokasi utama pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nabire. Kedua lokasi tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. BPKAD berperan dalam pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan daerah, sedangkan PUPR berperan sebagai perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan penelitian mengacu pada jadwal akademik IPDN Tahun Akademik 2025/2026, sedangkan proses pengumpulan data lapangan, termasuk wawancara dengan informan, dilaksanakan pada tahun 2026. Dengan lokasi dan waktu penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai optimalisasi DAK Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Pembahasan tidak diarahkan pada faktor penghambat maupun upaya sebagai fokus tersendiri, tetapi dipusatkan pada bagaimana pengelolaan DAK Fisik dilihat melalui dimensi optimalisasi yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan operasionalisasi konsep, optimalisasi dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya. Dimensi tujuan digunakan untuk melihat kejelasan arah kebijakan dan sasaran penggunaan DAK Fisik, serta efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran dalam mendukung pembangunan infrastruktur prioritas. Dimensi alternatif keputusan digunakan untuk menilai strategi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan menyesuaikan alokasi DAK Fisik dengan kebutuhan daerah. Sementara itu, dimensi sumber daya digunakan untuk melihat dukungan aparatur, sistem informasi, dan sarana administrasi dalam pengelolaan DAK Fisik. Dengan menggunakan ketiga dimensi tersebut, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sejauh mana DAK Fisik telah dioptimalkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire, terutama pada sektor jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana pendukung pelayanan publik.

3.1 Tujuan

Dimensi tujuan dalam optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran telah diarahkan pada sasaran pembangunan infrastruktur yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam konteks Kabupaten Nabire, tujuan penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana pendukung pelayanan publik. Arah penggunaan tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik tidak hanya diposisikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar akses masyarakat, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, tujuan penggunaan DAK Fisik di Kabupaten Nabire telah diarahkan sesuai dengan petunjuk teknis pemerintah pusat dan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah. BPKAD Kabupaten Nabire berperan dalam mengoordinasikan pengelolaan

anggaran agar sesuai dengan ketentuan dan prioritas pembangunan, sedangkan Dinas PUPR Kabupaten Nabire berperan dalam pelaksanaan teknis pembangunan infrastruktur. Keterpaduan peran tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan penggunaan DAK Fisik telah memiliki sasaran yang jelas, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur prioritas yang berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep optimalisasi yang menempatkan tujuan sebagai dasar utama dalam menentukan arah pelaksanaan kegiatan, karena suatu program dapat dikatakan optimal apabila memiliki sasaran yang jelas dan dapat diarahkan pada pencapaian hasil yang diharapkan.

Kejelasan tujuan tersebut terlihat dari penentuan sektor prioritas DAK Fisik pada tahun 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, sektor jalan dan jembatan menjadi prioritas utama dengan alokasi sebesar Rp30.000.000.000 karena masih tingginya kebutuhan peningkatan akses dan kondisi jalan. Selain itu, sektor sanitasi dan permukiman juga mendapatkan alokasi sebesar Rp15.000.000.000 sebagai prioritas pendukung pelayanan dasar masyarakat. Pada tahun 2025, sektor jalan dan jembatan kembali menjadi prioritas utama dengan alokasi sebesar Rp32.000.000.000, sedangkan sektor irigasi memperoleh alokasi sebesar Rp28.000.000.000 sebagai prioritas strategis untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi. Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan penggunaan DAK Fisik di Kabupaten Nabire diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Dari sisi efektivitas dan efisiensi, penggunaan DAK Fisik di Kabupaten Nabire menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan anggaran pada kegiatan yang paling prioritas dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Pada tahun 2025, sektor jalan dan jembatan memperoleh alokasi sebesar Rp32.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp31.500.000.000 atau sekitar 90%. Sementara itu, sektor irigasi memperoleh alokasi sebesar Rp28.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp26.000.000.000 atau sekitar 85%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan DAK Fisik telah bergerak ke arah yang cukup efektif karena sebagian besar anggaran pada sektor prioritas dapat direalisasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Namun demikian, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa optimalisasi belum sepenuhnya mencapai kondisi maksimal karena masih terdapat selisih antara alokasi dan realisasi anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dimensi tujuan dalam optimalisasi DAK Fisik di Kabupaten Nabire dapat dinilai telah berjalan cukup baik karena penggunaan dana telah diarahkan pada pembangunan infrastruktur prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Sasaran pembangunan yang ditetapkan juga memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan publik masyarakat. Meskipun demikian, optimalisasi pada dimensi tujuan masih perlu diperkuat agar alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat semakin tepat sasaran dan menghasilkan capaian pembangunan yang lebih maksimal. Dengan demikian, DAK Fisik di Kabupaten Nabire telah berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah, terutama melalui penetapan tujuan pembangunan yang diarahkan pada sektor jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana dasar masyarakat.

3.2 Alternatif Keputusan

Dimensi alternatif keputusan dalam optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah menentukan pilihan program pembangunan infrastruktur yang paling tepat berdasarkan kebutuhan daerah, ketersediaan anggaran, kesiapan pelaksanaan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Nabire, alternatif keputusan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan kegiatan yang akan dibiayai melalui

DAK Fisik, tetapi juga mencerminkan kemampuan BPKAD dan Dinas PUPR dalam menyusun prioritas pembangunan secara selektif. Hal ini penting karena DAK Fisik memiliki ketentuan penggunaan yang harus selaras dengan petunjuk teknis pemerintah pusat, namun pada saat yang sama juga harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, proses alternatif keputusan dalam pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Nabire dilakukan melalui evaluasi terhadap program-program pembangunan yang dianggap paling mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. BPKAD bersama Dinas PUPR melakukan penyesuaian alokasi anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur daerah, kesiapan pelaksanaan kegiatan, kondisi geografis wilayah, serta kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui proses pertimbangan administratif dan teknis agar program yang dipilih benar-benar dapat mendukung pembangunan infrastruktur prioritas. Dalam naskah skripsi dijelaskan bahwa BPKAD bersama Dinas PUPR melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pembangunan yang paling mendesak, termasuk kesiapan program dan kemampuan pelaksanaan kegiatan agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif.

Alternatif keputusan juga terlihat dari adanya koordinasi antara BPKAD sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan keuangan dan Dinas PUPR sebagai perangkat daerah teknis yang melaksanakan pembangunan infrastruktur. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan, memverifikasi kesiapan kegiatan, serta menyesuaikan keputusan anggaran dengan kondisi lapangan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan kegiatan agar setiap keputusan yang diambil dapat menyesuaikan perkembangan pekerjaan, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan penggunaan DAK Fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Nabire tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang memahami kebutuhan infrastruktur di lapangan.

Pada dimensi ini, strategi pemerintah daerah dalam mengatur prioritas pembangunan menjadi bagian penting dari optimalisasi DAK Fisik. Pemilihan sektor jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan permukiman sebagai prioritas menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengarahkan DAK Fisik pada kegiatan yang memiliki nilai manfaat langsung bagi masyarakat. Keputusan tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian antara kebutuhan pembangunan daerah dan arah penggunaan DAK Fisik. Dalam teori optimalisasi, alternatif keputusan menjadi unsur penting karena pencapaian tujuan tidak hanya ditentukan oleh adanya sasaran pembangunan, tetapi juga oleh kemampuan memilih keputusan terbaik di antara berbagai kemungkinan penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, semakin tepat alternatif keputusan yang diambil, semakin besar peluang DAK Fisik memberikan hasil pembangunan yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam skripsi, dimensi alternatif keputusan pada pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Nabire dapat dinilai telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya proses penentuan prioritas program, koordinasi antarperangkat daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. BPKAD dan Dinas PUPR tidak hanya mempertimbangkan aspek anggaran, tetapi juga memperhatikan kondisi lapangan dan manfaat kegiatan bagi masyarakat. Dengan demikian, alternatif keputusan dalam penggunaan DAK Fisik telah mendukung proses optimalisasi pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire. Meskipun demikian, agar optimalisasi semakin kuat, pengambilan keputusan perlu terus diarahkan pada prinsip ketepatan prioritas, kesesuaian kebutuhan daerah, dan keterpaduan koordinasi antarperangkat daerah sehingga

DAK Fisik benar-benar menjadi instrumen pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

3.3 Sumber Daya

Dimensi sumber daya dalam optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik digunakan untuk melihat sejauh mana dukungan sumber daya manusia, sistem informasi, sarana administrasi, dan perangkat pendukung lainnya mampu menunjang pengelolaan DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire. Dalam teori optimalisasi, sumber daya memiliki kedudukan penting karena tujuan dan alternatif keputusan yang telah ditetapkan tidak akan berjalan maksimal apabila tidak didukung oleh kemampuan aparatur, ketersediaan sarana, serta sistem kerja yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan DAK Fisik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya aparatur dalam pengelolaan DAK Fisik di Kabupaten Nabire telah tersedia melalui keterlibatan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis, terutama BPKAD dan Dinas PUPR Kabupaten Nabire. BPKAD berperan dalam pengelolaan keuangan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, sedangkan Dinas PUPR berperan dalam pelaksanaan teknis pembangunan infrastruktur di lapangan. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pengelolaan DAK Fisik telah didukung oleh perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun demikian, optimalisasi sumber daya tetap membutuhkan kemampuan aparatur yang tidak hanya memahami aspek administratif keuangan, tetapi juga mampu menyesuaikan pelaksanaan program dengan ketentuan teknis, kebutuhan daerah, dan target pembangunan infrastruktur.

Pada aspek sumber daya manusia, kompetensi aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan DAK Fisik. Aparatur pengelola dituntut memahami mekanisme perencanaan, penganggaran, penggunaan aplikasi, penyusunan laporan, serta ketentuan teknis yang berkaitan dengan DAK Fisik. Berdasarkan temuan penelitian, kompetensi aparatur BPKAD Kabupaten Nabire secara umum telah mendukung pelaksanaan pengelolaan DAK Fisik, namun penguasaan teknis terhadap sistem informasi dan aplikasi pendukung masih perlu terus diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sumber daya telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal apabila dilihat dari pemerataan kemampuan teknis aparatur dalam mengelola administrasi dan pelaporan DAK Fisik. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting agar pengelolaan DAK Fisik dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Selain aparatur, sistem informasi dan sarana administrasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi DAK Fisik. Pengelolaan DAK Fisik membutuhkan sistem informasi yang mampu menunjang proses input data, pengolahan informasi, pelaporan keuangan, serta pemantauan realisasi kegiatan secara tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian, sistem informasi keuangan di Kabupaten Nabire telah digunakan dalam pengelolaan DAK Fisik, tetapi integrasi sistem belum sepenuhnya maksimal. Jaringan internet telah tersedia, namun belum stabil sehingga dapat memengaruhi kelancaran proses penginputan dan pelaporan. Perangkat komputer juga telah tersedia, tetapi jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan kerja administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya pendukung secara umum sudah ada, namun masih perlu diperkuat agar proses pengelolaan DAK Fisik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Ketersediaan aplikasi pendukung dalam pengelolaan DAK Fisik juga menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem administrasi keuangan daerah. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung proses pelaporan dan pengelolaan data, tetapi dalam praktiknya masih terdapat kebutuhan terhadap proses manual pada beberapa tahapan. Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi administrasi telah mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya mampu menggantikan proses kerja manual secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberadaan sistem informasi harus didukung oleh kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi, kualitas jaringan yang stabil, serta ketersediaan sarana kerja yang memadai. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara terpadu, maka pengelolaan DAK Fisik dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, dimensi sumber daya dalam optimalisasi DAK Fisik di Kabupaten Nabire dapat dinilai telah tersedia dan mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, tetapi belum sepenuhnya mencapai kondisi optimal. Ketersediaan aparatur, sistem informasi, jaringan internet, perangkat komputer, dan aplikasi pendukung telah menjadi modal penting dalam pengelolaan DAK Fisik. Namun, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi aparatur, pemerataan penguasaan teknologi, penguatan integrasi sistem, serta penyediaan sarana administrasi yang lebih memadai. Dengan demikian, sumber daya merupakan dimensi penting yang menentukan keberhasilan optimalisasi DAK Fisik karena menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat dikelola secara tertib, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire secara berkelanjutan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mencapai kondisi optimal. Temuan ini terlihat dari tiga dimensi utama yang digunakan dalam penelitian, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya. Pada dimensi tujuan, penggunaan DAK Fisik telah diarahkan pada pembangunan infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memahami fungsi DAK Fisik sebagai instrumen transfer fiskal yang mendukung pembangunan sarana dasar masyarakat. Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut masih perlu diperkuat agar penggunaan anggaran tidak hanya sesuai dengan petunjuk teknis, tetapi juga mampu menghasilkan capaian pembangunan yang lebih maksimal dan merata.

Temuan pada dimensi alternatif keputusan menunjukkan bahwa BPKAD bersama Dinas PUPR Kabupaten Nabire telah melakukan koordinasi dalam menentukan prioritas program pembangunan infrastruktur. Penentuan program dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, kesiapan pelaksanaan kegiatan, kondisi lapangan, serta ketersediaan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam penggunaan DAK Fisik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan aspek teknis pembangunan. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Ridwan & Baso, 2017) bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan ketepatan penentuan prioritas program. Dalam konteks Kabupaten Nabire, pemilihan sektor jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi sebagai prioritas menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan DAK Fisik pada kebutuhan infrastruktur yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Pada dimensi sumber daya, penelitian ini menemukan bahwa dukungan aparatur, sistem informasi, dan sarana administrasi telah tersedia, tetapi masih perlu diperkuat agar pengelolaan DAK Fisik dapat berjalan lebih efektif. Ketersediaan BPKAD sebagai pengelola keuangan daerah dan

Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis menunjukkan adanya pembagian peran kelembagaan yang jelas. Akan tetapi, optimalisasi DAK Fisik tetap membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menguasai sistem administrasi, pelaporan, dan aplikasi keuangan daerah secara baik. Hal ini memperkuat pandangan (Akbar, 2013) bahwa pengelolaan keuangan publik harus dilaksanakan secara akuntabel, tertib, efektif, dan berorientasi pada manfaat masyarakat. Dengan demikian, sumber daya menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan optimalisasi DAK Fisik dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire.

Secara keseluruhan, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa DAK Fisik telah berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur Kabupaten Nabire, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan pelayanan dasar masyarakat. Namun, optimalisasi tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya maksimal karena masih memerlukan penguatan pada ketepatan perencanaan, pengambilan keputusan, kapasitas aparatur, dan dukungan sistem administrasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Pambudi & Pramujo, 2022) bahwa dana transfer khusus dapat mendukung pembangunan infrastruktur apabila diarahkan secara tepat pada kebutuhan daerah. Dengan demikian, keberhasilan optimalisasi DAK Fisik di Kabupaten Nabire tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas, mengelola sumber daya, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah telah berjalan cukup baik melalui pengarahan anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana pendukung pelayanan publik. Optimalisasi tersebut terlihat dari kejelasan tujuan penggunaan DAK Fisik, penentuan alternatif keputusan dalam memilih program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, serta pemanfaatan sumber daya kelembagaan melalui peran BPKAD dan Dinas PUPR Kabupaten Nabire. Meskipun belum sepenuhnya mencapai kondisi maksimal, DAK Fisik telah berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah, terutama dalam memperkuat aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Nabire.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ruang lingkup kajian yang hanya difokuskan pada optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik geografis, kapasitas fiskal, dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data utama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kondisi empiris, bukan pada pengukuran statistik hubungan antarvariabel. Penelitian ini juga terbatas pada dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya dalam teori optimalisasi, sehingga masih terdapat aspek lain di luar fokus penelitian yang kemungkinan turut memengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian

mengenai optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan cakupan wilayah yang lebih luas, periode data yang lebih panjang, serta objek pembangunan infrastruktur yang lebih beragam. Penelitian lanjutan juga dapat membandingkan pengelolaan DAK Fisik antara beberapa kabupaten/kota di wilayah Papua Tengah atau wilayah lain yang memiliki karakteristik geografis serupa, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dana transfer dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur hubungan antara alokasi DAK Fisik, realisasi anggaran, dan capaian pembangunan infrastruktur secara lebih terukur, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan proses optimalisasi, tetapi juga mampu menunjukkan dampaknya terhadap peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas pelayanan publik masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nabire beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, data, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dukungan, dan motivasi selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. C., Effendi, N., Budiono, B., & Hadiyanto, F. (2024). Fiscal transfer redistribution and regional inequality between island and non-island provinces in Indonesia. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 7(2), 2523–2559. https://e-journal.uac.ac.id/index.php/iijse/article/view/4529

Akbar, B. (2013). Sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia. Jakarta: CV Bumi Metro Raya.

Aritenang, A. F. (2020). The effect of intergovernmental transfers on infrastructure spending in Indonesia. Journal of the Asia Pacific Economy, 25(3), 571–590. https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1675352

Azaki, N., & Lutfi, A. (2023). Capital grants for local infrastructure provision in perspective of allocative efficiency: Evidence from Indonesia. Journal of Public Administration Studies, 8(2), 1–9. https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2023.008.02.1

Fadilla, M. I., & Ratnawati, N. (2024). Peranan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jurnal Ekonomi: Journal of Economic, 15(1), 10–22. https://doi.org/10.47007/jeko.v15i01.7442

Hardianto, Rasubala, J. J. J., & Helmiwan, T. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bolaang Mongondow Raya. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(6), 2562–2568. https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/2961

Irmanda, M. A., Sutrisno, E., & Giyanto, B. (2024). Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Air Minum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi. Journal of Public Policy and Applied Administration, 6(1), 15–28. https://doi.org/10.32834/jplan.v6i1.732

Lewis, B. D. (2013). Local government capital spending in Indonesia: Impact of intergovernmental fiscal transfers. Public Budgeting & Finance, 33(1), 76–94. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2013.12002.x

Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources. Regional Studies, 51(11), 1695–1707. https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957

Mahi, B. R., & Resosudarmo, B. P. (2025). Regional public infrastructures and development in decentralized Indonesia. Applied Economics, 57(40), 6287–6304. https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2383330

Najmuddin, N., Achmad, M., & Suwanda, D. (2024). Efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pengembangan infrastruktur desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi: Studi kasus Desa Karang Satria. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 4(2), 497–513. https://doi.org/10.37481/jmeb.v4i2.743

Pambudi, A. S. (2021). Evaluasi on going Dana Alokasi Khusus Fisik bidang pendidikan dalam masa pandemi Corona Virus Disease-19 berbasis Intelligence Media Management (IMM). Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 4(2), 1–7. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.1792

Pambudi, A. S. (2022). Sinkronisasi perencanaan pembangunan top-down dan bottom-up tentang pembangunan air minum: Studi kasus di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(1), 23–43. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2335

Pambudi, A. S. (2023). Potret temuan implementasi pembangunan bidang pendidikan: Studi kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 193–212. https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.173

Pambudi, A. S., & Pramujo, B. (2022). Peran dana transfer khusus bagi pembangunan bidang irigasi pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 5(1), 20–28. https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2250

Pambudi, A. S., & Putri, D. M. A. C. (2022). Evaluasi dukungan DAK Fisik bidang pariwisata bagi pembangunan daerah: Studi kasus nasional dan Provinsi Jawa Timur. Bappenas Working Papers, 5(1), 31–47. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.106

Pasaribu, B. S. (2022). Metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis. Tangerang: Media Edu Pustaka.

Ridwan, R., & Baso, N. (2017). Perencanaan pembangunan daerah. Bandung: Alfabeta.

Saktina, R. J., & Khoirunnurrofik, K. (2022). The effect of geographical conditions on the role of the Special Autonomy Fund for the availability of road infrastructure in Papua. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 14(1), 111–122. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.111-122

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan: Teoretik, legalistik, empirik, dan inovatif. Bandung: Alfabeta.

Siringoringo, H. (2005). Seri teknik riset operasional: Pemrograman linear. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiri, D., & Nilawati, A. (2022). Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk perbaikan kawasan wisata Museum Karst Indonesia. Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis, 6(2), 633–646. https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i2.966

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan pembangunan daerah di Indonesia. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 5(2), 175–200. https://doi.org/10.29303/jaa.v5i2.99

Trisnawati, K., & Yudartha, I. P. D. (2024). Analisis pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Badung. Socio-Political Communication and Policy Review, 1(6), 1–8. https://doi.org/10.61292/shkr.181

Vidyattama, Y., Sutiyono, W., & Sugiyarto. (2022). Factors of budget delay: Local government capacity, bargaining and political interaction in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 58(1), 55–77. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1812515

